

Judul : Destry Damayanti Pimpin BI Hingga 2031
Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

MONETER

Destry Damayanti Pimpin BI hingga 2031

JAKARTA, KOMPAS — Komisi XI DPR menyepakati Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031. Keputusan itu akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR, 1 September 2026.

Ketua Komisi XI DPR Muchamad Misbakhun mengatakan, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah untuk mufakat setelah komisi menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan keputusan (*fit and proper test*) calon gubernur BI dan calon deputi gubernur BI.

"Komisi XI DPR, berdasarkan musyawarah untuk mufakat, menyetujui dan menetapkan Destry Damayanti sebagai calon gubernur BI periode 2026-2031," kata Misbakhun saat dikonfirmasi Kompas, Kamis (27/8/2026).

Selain Destry, Komisi XI juga menyepakati Aida S Budiman sebagai calon deputi gubernur senior BI periode 2026-2031 serta Solikin M Juhro sebagai calon deputi gubernur BI untuk periode yang sama.

Menurut Misbakhun, hasil tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan pada Selasa (1/9). Dalam rapat tersebut, DPR sekaligus akan menetapkan posisi gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur BI.

Misbakhun mengatakan, dengan adanya keputusan tersebut, proses pergantian jajaran pimpinan BI di tingkat Komisi XI telah tuntas. Apabila disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, Destry pun akan menduduki kursi nomor satu di BI selama lima tahun ke depan.

Destry dan Aida telah menjalani rangkaian uji kelayakan dan keputusan di Komisi XI

pada Rabu (26/8). Sementara pada Kamis, Komisi XI menggelar rapat dengar pendapat umum berupa uji kelayakan dan keputusan terhadap dua calon deputi gubernur BI, yakni Solikin M Juhro dan M Anwar Bashori.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal mengatakan, rangkaian uji kelayakan dan keputusan menunjukkan visi Destry sejalan dengan harapan DPR untuk memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Hekal, pertumbuhan ekonomi yang stabil selama ini belum sepenuhnya diikuti penguatan kelas menengah dan industri domestik. Ia berharap kebijakan BI di bawah pimpinan Destry dapat lebih memperhatikan sektor riil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor informal.

"Stabilitas tetap penting. Namun, bauran kebijakan BI ke depan perlu lebih memperhatikan pertumbuhan sektor riil," ujar Hekal.

Janji Destry

Destry merupakan calon tunggal gubernur BI yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR. Ia sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior BI dan saat ini menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI.

Di hadapan para anggota Komisi XI DPR dalam agenda uji kelayakan dan keputusan, Destry menjanjikan sinergi BI dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi sektor

riil dan penciptaan lapangan kerja.

"Tugas kami adalah bagaimana kita berusaha menjaga iklim ekonomi kondusif. Artinya, stabilitas terjaga, kemudian pertumbuhan *demand*-nya kuat, dan sebagainya. Ketersediaan pembiayaan juga ada. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah kita," katanya.

Dalam kerangka itu, Destry melanjutkan, BI akan mengoptimalkan bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan. Salah satu perhatiannya adalah memperkuat fungsi intermediasi perbankan. Ini termasuk mendorong penyerapan fasilitas kredit yang telah disetujui bank, tetapi belum ditarik oleh debitur alias *undisbursed loan*.

Penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah juga akan diperkuat agar aktivitas sektor riil meningkat. Langkah tersebut diharapkan ikut menopang daya beli masyarakat dan memperluas penciptaan lapangan kerja.

Destry menyatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan BI terhadap target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. "Kita mendukung pemerintah. Itu adalah memang rencana pemerintahnya," katanya.

Sementara itu, dalam agenda uji kelayakan dan keputusan, Solikin M Juhro menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, orientasi kebijakan BI yang *pro-growth* tidak berarti mengesampingkan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas.

"Orientasi *pro-growth* bukanlah penyimpangan dari mandat stabilitas. Justru merupakan pelaksanaan mandat tersebut secara lebih utuh, lebih holistik untuk kepentingan yang lebih besar," ujarnya.

Solikin yang telah bekerja di bank sentral selama 32 tahun mengatakan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak dipertentangkan. Stabilitas yang terjaga membuka ruang bagi pertumbuhan, sementara pertumbuhan ekonomi yang kuat pada akhirnya dapat memperkuat stabilitas.

Ia mengusung tiga misi utama, yakni membangun stabilitas yang dinamis, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan memperluas inklusivitas ekonomi.

Menurut Solikin, stabilitas nilai tukar dan inflasi tetap menjadi jangkar kredibilitas kebijakan BI. Namun, pada saat yang sama, likuiditas perlu dipastikan mengalir ke sektor produktif.

Untuk itu, BI perlu memadukan operasi moneter, pendalaman pasar uang, serta insentif likuiditas. Kebijakan tersebut, menurut dia, tetap harus dikalibrasi agar dukungan terhadap pertumbuhan tidak mengganggu stabilitas. "Semuanya harus terkalibrasi bersama, bukan ekspansi tanpa batas. Akan tetapi, yang tetap konsisten dengan stabilitas," ujarnya.

Solikin juga mendorong kebijakan makroprudensial yang lebih adaptif untuk memperkuat intermediasi perbankan. "Orientasinya bukan sekadar meningkatkan pertumbuhan kredit, melainkan memastikan pembiayaan tersebut berdampak nyata terhadap perekonomian," ujarnya. (DAM)